

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis peneliti pada bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti akan memberikan sebuah kesimpulan dari pertanyaan peneliti yaitu bagaimana *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru dilihat melalui salah satu prinsip *good governance* yaitu berorientasi pada konsensus (*consensus orientation*). Sebagai daerah otonomi baru dan heterogen, Kabupaten Dharmasraya sudah berhasil menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik yang kemudian dibuktikan melalui berbagai prestasi. Namun pada faktanya, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru dengan penduduk yang heterogen tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan. Dampak nyata kondisi daerah Kabupaten Dharmasraya yang merupakan daerah otonomi baru dan juga heterogen, mengakibatkan timbulnya permasalahan dan juga hambatan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya.

Namun, hambatan dan permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan melalui berbagai upaya dan prosedur terbaik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Prosedur dan upaya tersebut dinilai sangat efektif diterapkan di Kabupaten Dharmasraya sehingga prosedur dan upaya tersebut selanjutnya dijadikan sebagai *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya. Upaya dan prosedur tersebut diantaranya adalah: Pertama, pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah bertindak sebagai mediator/penengah

dalam mengatasi setiap permasalahan dan kepentingan yang berbeda pada setiap masyarakatnya, sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Kedua, pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga memberlakukan berbagai prosedur dan upaya dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Prosedur dan upaya tersebut diantaranya adalah pembentukan program inovatif sesuai dengan visi misi, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan kebudayaan. Terdapat pula faktor pendukung yang juga mempengaruhi keberhasilan Kabupaten Dharmasraya dalam menerapkan setiap prosedur dan upaya tersebut yaitu melalui koordinasi dan hubungan yang baik dengan pemerintah Pusat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga memberlakukan kiat khusus dalam menyelenggarakan pemerintahannya yaitu selalu berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan konsep consensus orientation menurut UNDP dikatakan bahwa pemerintah yang baik bertindak sebagai mediator atau penengah untuk mengatasi permasalahan dan kepentingan yang berbeda, dan jika dimungkinkan dapat memberlakukan berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbagai program dan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya merupakan sebuah upaya untuk mencegah timbulnya permasalahan di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru serta adanya ketimpangan dan perbedaan pada masyarakatnya yang heterogen.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru (DOB), maka dengan ini peneliti memberikan saran atau rekomendasi sehingga untuk peneliti berikutnya menjadi lebih jelas lagi dalam mengkaji proses perencanaan pemekaran daerah.

1. Demi terselenggaranya pemerintahan yang lebih baik lagi (*good governance*), kedepannya diharapkan pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga dapat menjalin hubungan dan koordinasi yang baik dengan organisasi perangkat daerahnya, pihak swasta dan juga Masyarakatnya, bukan hanya kepada Pemerintah Pusat saja. Sehingga kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik.
2. Dikarenakan keterbatasan peneliti dalam penelitian ini, maka pada penelitian selanjutnya dapat mengkaji *best practices* desentralisasi politik di Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah otonomi baru melalui prinsip-prinsip *good governance* lainnya.

